

**TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAH DESA DOLOK MASANGO KECAMATAN BINTANG  
BAYU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Universitas Medan Area



**OLEH**

**SURIATI**  
**12.851.0039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai**

**Nama : SURIATI**  
**NPM : 12.851.0039**  
**Program STudi : Ilmu Pemerintahan**

**DISETUJUI OLEH :**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Drs. Usman Tarigan, M,Si**

**Anggreni Atmei Lubis, SH,M,Hum**

**Diketahui Oleh :  
Dekan**

**Prof. Dr. H. M.Arief Nasution, M A**

## **ABSTRAK**

### **SURIATI, NPM. 12.851.0039. Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe kepemimpinan kepala desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket, obesrvasi, wawancara, skala bertingkat dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sestematik. Dalam model kegiatan ini kegiatan analisa dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Dari hasil penelitian bahwa tipe kepemimpinan kepala desa di dolok masango memiliki tipe kepemimpinan yang kharismatik dan demokratis. Kepala Desa Dolok Masango memiliki daya tarik sehingga masyarakat desa merasa tenang dan merasa nyaman dengan memiliki pemimpin yang prilakunya sopan, ramah sehingga banyak disukai dan disenangi masyarakat, begitupula aparatur pemerintahan Desa Dolok Masango senang dan selalu bekerja sama tidak hanya sopan dan ramah beliau juga merupakan inspiratif yang baik dengan mengerjakan tugasnya sebagai Kepala Desa yang baik. Desa Dolok Masango memiliki beberapa fasilitas yang masih baik seperti bangunan sekolah, bangunan kesehatan, fasilitas olah raga yang di dukung oleh masyarakat yang mandiri terbukti dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dikhususkan bagi ibu-ibu yang ingin berusaha dan tidak memiliki modal. Pemerintahan Desa melaksanakan tugas memberikan apresiasi juga kritik yang membangun demi kemajuan Desa Dolok Masango.

**Kata Kunci : Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi muhammad SAW sebagai rahmat bagi khalid alam. Skripsi ini berjudul "Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu" penulis skripsi ini dilaksanakan adalah untuk melengkapi syarat- syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Medan Area.

Dalam penulis skripsi ini banyak mengalami kesulitan disebabkan masih kurangnya ilmu dan pengalaman yang ada pada penulis, namun berkat taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan dari semua pihak penulis bukanlah apa-apa, oleh karen itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan material dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.A Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, selaku Dosen Fakultas ISIPOL.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga bagi penulis dari awal hingga selesai skripsi ini.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M,Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Najaruddin Kepala Desa Dolok Masango Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan para staf yang telah mengizinkan penulis dalam mengadakan penelitian tersebut.
7. Dan ucapan terimakasih yang sama kepada semua pihak yang turut membantu yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk perbaikan skripsi ini nantinya, agar dapat menjadi pedoman pada penulisan skripsi.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulisan skripsi nantinya, Amin ya robbal'Alamin.

Medan , April 2016

**Peneliti**

**SURIATI**

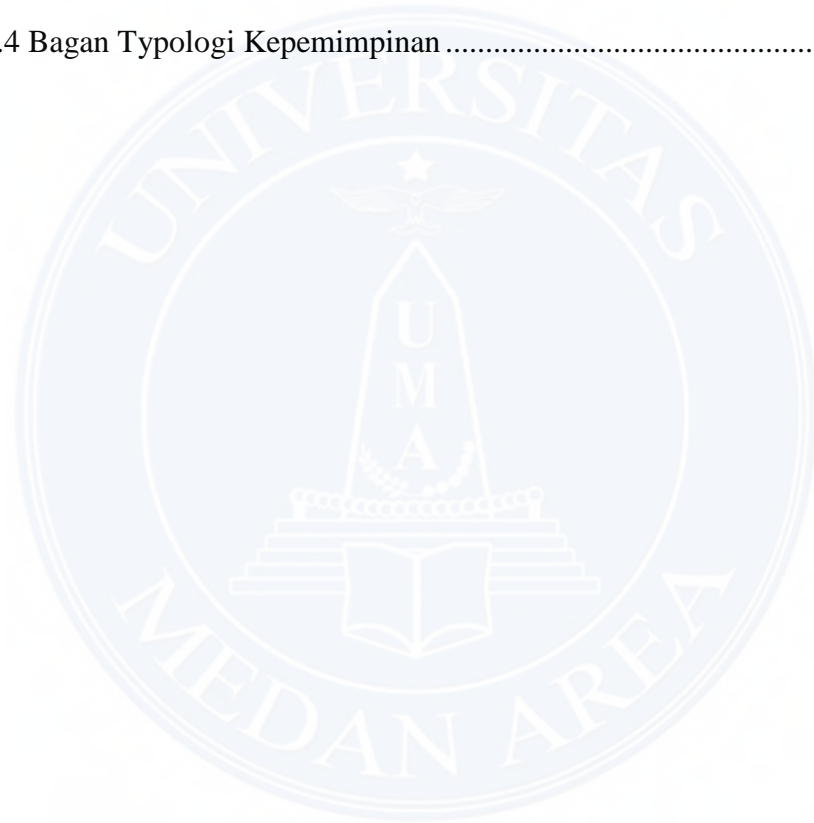
## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.LatarBelakangMasalah .....	1
1.2.IdentifiaksiMasalah .....	4
1.3.PembatasanMasalah.....	5
1.4.PerumusanMasalah.....	5
1.5.TujuandanManfaatPenelitian.....	5
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1 Uraian Teori .....	7
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan .....	7
2.1.2 Fungsi Pemimpin .....	8
2.1.3 Pemimpin Yang Ideal.....	13
2.1.4 Pengertian Tipe Kepemimpinan.....	15
2.1.5 Kepala Desa.....	19
2.1.6 Konsep Pemerintahan Desa.....	26
2.2 Hipotesis.....	37

2.3. Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2 Populasi dan Sampel .....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4 Defenisi Operasional Variabel .....	40
3.5 Teknik Analisa Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	43
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Karakteristik Informan Menurut Usia.....	44
Tabel 4.2. Karakteristik Informan Menurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4.4 Bagan Typologi Kepemimpinan .....	47





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan suatu tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Diberlakukannya undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah semakin menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan ( Robbins 2002: 163)

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi, kemampuan dan keterampilan dalam pengarahannya dalam faktor penting efektifitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas- kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyelaksai pemimpin- pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan , melalui kepemimpinan dan dukungan oleh pemerintah yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia (Istianto, 2009:2)

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara diri seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya pelayanan pada masyarakat dengan maksimal, dengan meningkatnya mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur desa dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Esensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi tatalaku orang lain baik sebagai bawahan, rekan kerja atau atasan, adanya pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, ajuran, bujukan, atau sugesti atau dalam bentuk lainnya dan adanya tujuan yang hendak dicapai (Handoko 2005 : 31). Huges (1992) dalam Handoko (2005: 45) mengatakan bahwa *government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it*, yang berarti bahwa organisasi public dibuat oleh publik, untuk public, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada public. Bertumpu pada pendapat ini, pemimpin organisasi public diwajibkan berakuntabilitas atas kerja yang dicapai organisasinya. Tujuan utama organisasi public adalah memberikan pelayanan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat seoptimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seseorang kepala desa selaku pemimpin organisasi desa harus memiliki tipe kepemimpinan yang baik dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sytem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Bintaro, 2007: 17).

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup berdorong – dorong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan (Khairuddin, 2004 : 5 ) pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem pelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisitas telah bergulir sampai pada tingkat pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal tersebut , maka pada hakikatnya desa merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala desa, sehingga kepala desa melaksanakan pemerintahan dengan menggunakan kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ( Khairuddin, 2004: 7)

Terkait penyelenggaraan pemerintah desa secara praktis masih diharapkan pada bagian personalan, salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa yang tidak sesuai dengan sangat demokrasi, fenomena umum tersebut juga terjadi di desa dolok masango Kec. Bintang Bayu. Berdasarkan hasil prariset dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat maka diketahui bahwa :” selama ini kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa masih bersifat tertutup dan kurang transparan, khususnya sebagai pemimpin, kepala desa mampu membanggakan tipe kepemimpinan yang baik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembagunan dan bersifat transparan dalam penggunaan keuangan desa, karena pada dasarnya keuangan desa adalah dana milik rakyat yang harus dikelola dan dialokasikan demi kepentingan masyarakat. Perubahan inilah yang diharapkan oleh masyarakat secara umum “ Tipe kepemimpinan pada dasarnya merupakan serangkaian perilaku yang ditampilkan oleh seseorang pemimpin dalam rangka mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk berperilaku atau berbuat sesuatu sebagaimana diarahkan oleh pimpinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan membuat judul skripsi mengenai “ **Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dolok Masango kecamatan Bintang Bayu**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa belum diyakini masyarakat bagus.
2. Tipe kepemimpinan kepala desa masih yang diharapkan oleh masyarakat.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah pada poin diatas maka peneliti memfokuskan pada tipe kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintah di Desa Dolok Masago Kecamatan Bintang Bayu

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Dolok Masago Kecamatan Bintang Bayu?
2. Tipe apakah yang akan digunakan kepala desa dolok masago dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Dolok Masago Kecamatan Bintang Bayu?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mempengaruhi tipe kepemimpinan kepala desa Dolok Masago Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

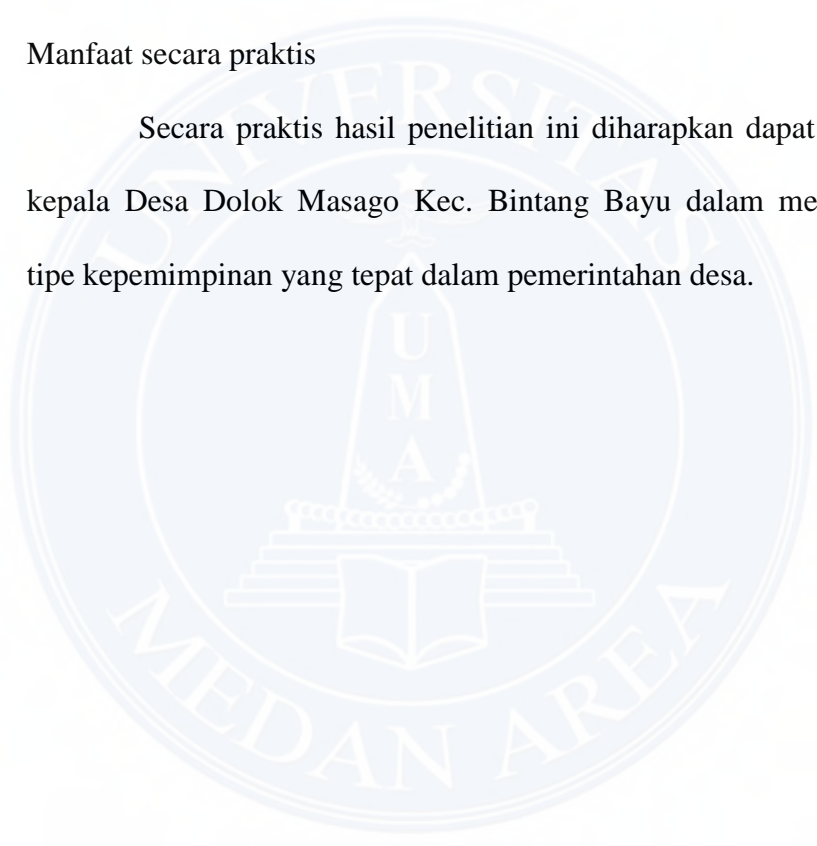
##### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1) Manfaat secara teoritis

Secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, khususnya berkaitan dengan tipe kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa dan otonomi daerah pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa dan otonomi daerah.

2) Manfaat secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepala Desa Dolok Masago Kec. Bintang Bayu dalam mengembangkan tipe kepemimpinan yang tepat dalam pemerintahan desa.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1. Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya satu maksud dan beberapa tujuan ( Kartono, 2005: 76).

Kepemimpinan merupakan proses pengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Umur (2008:38) mengidentifikasi kemampuan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.

Sedangkan menurut Hasibuan (2003:170)” kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.

Dimana defenisi kepemimpinan akhirnya di kategorikan menjadi tiga elemen.( Susanto A.B: Koesnadi Kardi, 2003:115). Yakni:

1. Kepemimpinan merupakan proses
2. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara pimpinan dan bawahan.



### 3. Kepemimpinan merupakan ajaran kepada orang lain.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

#### **2.1.2 Fungsi Pemimpin**

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, sehungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada dalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.

Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu:

1. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinya.
2. Dimensi yang berkenan dengan tingkat kedudukan atau ketertibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin.



Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Namawi, secara operasional dapat dibedakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

### *1. Fungsi instruktif*

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu melalui, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi pemimpin. Fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan pemimpin tanpa kemauan bawahannya tidak akan berarti. Jika perintah tidak dilaksanakan juga tidak ada artinya, intinya bersumber dari keputusan yang ditetapkan. Perintah yang jelas dari pemimpin juga sebagai perwujudan proses bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam pencapaian pelayanan pada masyarakat sesuai tujuan.

### *2. Fungsi konsultatif*

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultasi sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back), yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

### *3. Fungsi partisipasi*

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan. Sekalipun memiliki kesempatan yang sama yang bukan berarti setiap orang bertindak semuanya tetapi harus dilakukan dan dikerjakan secara terkendali dan terarah yang merupakan kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Dengan demikian musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam kesempatan berpartisipasi melaksanakan program organisasi, pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.

#### *4. Fungsi Delegasi*

Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pemilihan wewenang, membuat, atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang di beri kepercayaan untuk pemelihan wewenang dengan melaksanakan dengan melaksanakan dengan bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin di wujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin bekerja seorang diri, ia pasti tidak dapat membuat banyak dan mungkin tidak mungkin tidak berarti sama sekali. Oleh karena

itu sebagian wewenang perlu didelegasikan kepada para bawahannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### *5. Fungsi pengendalian*

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur efektivitas anggota secara terarah dan dalam kordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapai tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan perseorangan dalam melaksanakan beban kerja ataupun perintah dari pimpinanya.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diatas, diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Aktivitas atau kegiatan kepemimpinan yang bersifat integral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung sebagai berikut:

- a.* Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja yang menjadi keputusan yang kongrit untuk melaksanakan sesuai dengan prioritasnya masing- masing keputusan- keputusan itu harus jelas hubungan dengan tujuan organisasi.
- b.* Pemimpin harus mampu menterjemahkan keputusan- keputusan menjadi instruksi yang jelas, sesuai dengan kemampuan anggota yang melaksanakannya. Setiap anggota harus mengetahui dari siapa instruksi diterima dan pada siapa dipertanggung jawabkan.
- c.* Pimpinan harus berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Pimpinan harus mampu menghargai gagasan, pendapat,

saran, kritik anggotanya sebagai wujud dari partisipasinya. Usaha mengembangkan partisipasi anggota tidak sekedar ikut aktif dalam melaksanakan perintah, tetapi juga dalam memberikan informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat dan memperbaiki keputusan-keputusan.

- d. Mengembangkan kerjasama yang harmonis, sehingga setiap anggota mengerjakan apa yang harus di kerjakan, dan bekerjasama dalam mengerjakan sesuatu yang memerlukan kebersamaan, pemimpin harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan prestasi atau kelebihan yang memiliki setiap anggota kelompok atau organisasi.
- e. Pemimpin harus membantu dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan batas tanggung jawab masing-masing setiap anggota harus di dorong agar tumbuh menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan menghadiri ketergantungan yang berlebihan dari pemimpin atau orang lain. Setiap anggota harus dibina agar tidak menjadi orang selalu menunggu perintah. Namun diharapkan setiap anggota adalah orang yang inisiatif artinya mampu bekerja dengan sendirinya karena kesadaran bahwa ia memiliki tanggung jawab.

### **2.1.3 Pemimpin Yang Ideal**

Secara garis besar seorang pemimpin ideal memiliki tiga kategori umum, yakni ( Arep, 2002:241):

1. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat, ia harus mampu menganalisa suatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan- kesimpulan yang tepat.
2. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyelesaikan dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan- putusan itu dapat diterima dengan baik.

Ketiga kemampuan tersebut, ideal dimiliki oleh orang pemimpin agar organisasi maju dan berkembang. Yang harus diingat, fungsi pemimpin juga harus dapat memotivasi staf/pegawainya. Untuk itu, paling tidak ada 8 watak atau sifat dari seorang pemimpin yang efektif dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain. Untuk dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipunyai oleh orang pemimpin yakni:

1. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang alat teknis teknis dan prosedur- prosedur yang dipergunakan oleh para pegawainya, sehingga ia dapat mempertunjukkan dalam mengoperasikan alat-alat serta prosedur yang diperlukan. Pengetahuan dan pengertian tentang garis- garis besar kebijaksanaan organisasi.

2. Seorang pemimpin harus senantiasa setia memegang teguh setiap ucapannya, ia harus senantiasa menepati janjinya, jika ingin menanam kepercayaan bawahannya, seorang pemimpin harus mampu memberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan, baik yang bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi.
3. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai keyakinan yang teguh atas segala sesuatu yang ingin dicapai. Tegasnya ia harus tahan dan tekun untuk mencari cara-cara melakukan sesuatu mendapatkan yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa memberikan kesalahan pemahaman dalam menjelaskan/mengemukakan tujuan organisasi kepada pihak lain. Baik berupa usul-usul maupun berupa keritikan dari pihak lain mampu dari pihak bawahannya.
5. Senantiasa menaruh minat yang tulus dan ikhlas terhadap orang lain. Tulus terhadap kesejahteraan bagi pihak bawahannya.
6. Kemampuan untuk memahami manusia serta reaksinya. Seorang pemimpin harus paham benar akan manusia baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dan mengetahui mengapa ia bertindak sedemikian rupa.
7. Seorang pemimpin harus senantiasa waspada untuk selalu bersifat objektif dan jangan sampai memberikan putusannya dipengaruhi oleh sentimen orang lain.



8. Seorang pemimpin harus senantiasa bersikap harus terang dan transparan, ia tidak boleh memberikan orang lain berkata terhadap dirinya: ia selalu ingin rahasia dan tertutup.

#### **2.1.4 Pengertian Tipe Kepemimpinan**

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan. (kartono, 2005:76). Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan bersama, umur (2008:38) mengidentifikasi kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.

Sedangkan menurut Hasibuan (2003:170)” kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi” dimana defenisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnandi Kardi, 2003: 115), yakni:

- Kepemimpinan merupakan proses;

- Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara pemimpin dan bawahan;
- Kepemimpinan merupakan ajaran kepada orang lain.

Dari sebagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kepemimpinan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk mengerjakan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. ( Kartono: 1994 :33). Kartini kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

### **1. Tipe Kharismatik**

Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa.

### **2. Tipe Paternalistik**

Tipe kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain;

- a. Menganggap bawahannya belum dewasa
- b. Bersikap terlalu melindungi



c. Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan

d. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

### **3. Tipe Otoriter**

Pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut:

a. Pemimpin organisasi sebagai miliknya

b. Pemimpin bertindak sebagai miliknya

c. Pemimpin bertindak sebagai direktur

d. Cara penggerakan bawahan dengan paksaan dan ancaman

### **4. Tipe Militeristik**

Dalam tipe ini Pemimpin mempunyai sifat:

a. Menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku

b. Lebih banyak menggunakan sistem perintah

c. Menghendaki keputusan mutlak dari bawah

d. Formalitas yang berlebih lebihan

e. Tidak menerima saran dan kritik dari bawahan

f. Sifat komunikasi hanya sepihak.

### **5. Tipe Demokrasi**

Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerja sama sehingga dapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengar saran dan kritik yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menarik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok. Sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin.

## **6. Tipe Kepemimpinan Menurut Hersey dan Blanchard (Situasional)**

1. Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan dirujuk sebagai intruksi karena gaya ini dicirikan dengan komunikasi 1 arah pemimpin memberikan batasan tentang bagaimana dan dimana melaksanakan berbagai tugas.

2. Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan dirujuk sebagai konsultasi karena dalam menggunakan gaya ini, pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hamper sama dengan keputusan.

3. Perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai partisipasi, karena posisi control atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian.

4. Perilaku pemimpin yang rendah pengarahan dan rendah dukungan dirujuk sebagai **delegasi**, karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan dan didelegasikan bersama kepada bawahan.

## **7. Tipe Kepemimpinan Populistik**

Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme.

## **8. Tipe Kepemimpinan Administratif/Eksekutif**

Kepemimpinan tipe administrative ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrative secara efektif. Pemimpinannya biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan.

## **9. Tipe Demokrasi**

Tipe Demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga dapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengar saran dan kritik. Pemimpin menitik beratkan pada aktivitas.

Dengan berbagai tipe kepemimpinan menurut Kartini Kartono maka seharusnya seorang pucuk pimpinan pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah kepala desa menggunakan tipe kepemimpinan yang bisa melibatkan semua lapisan masyarakat untuk terlibat dan juga berpartisipasi terhadap pelaksanaan program.

Pembangunan yang ada di desa. Dan tipe yang memungkinkan terjadinya interaksi antara semua pihak, baik dari pemerintah desa maupun pihak masyarakat adalah tipe kepemimpinan yang demokratis.

### **2.1.5 Kepala Desa**

Kepala desa merupakan pimpinan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah dapat persetujuan bersama BPD. Menurut Sudiarjo dalam bukunya pemerintahan desa (1984;259) kepala desa adalah seorang tokoh di desa yang

memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa mendefinisikan kepala desa adalah orang yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa dengan calon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan perwakilan desa yang disahkan oleh bupati menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adat merupakan kepala pemerintahan desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan melihat tipe kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Di mana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memainkan model atau tipe kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Untuk itu selain tipe kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa seorang kepala desa agar dalam pemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku.

Dengan melihat undang-undang yang baru yaitu undang-undang desa No. 6 Tahun 2014 yang mana dengan jelas dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin di mana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan dalam proses pembangunan di desa. Yang mana sesuai dengan undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014 maka di katakan pasal 26, 27, 28, 29, dan 30 sebagai berikut:

➤ Pasal 26

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1). Kepala desa berwenang.
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aset desa.
  - d. Menetapkan peraturan desa.
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta merekomendasikan desa serta menginteraksikannya agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebenarnya kemakmuran masyarakat desa.
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.
  - l. Memamfaat kan teknologi tepat guna.
  - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - o. Melakukan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata cara kerja pemerintahan desa.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban;
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun, 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan bianeka tunggal ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
- d. Menanti dan menegakkan peraturan perundang- undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadaan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional dan efektif dan efesien , bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalanin kerja sama dan koordinasi seluruh pengaku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan adminidtrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Mengelola keuntungan dan aset desa yang baik.
- j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.



➤ Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib;

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota.
- b. Menyampaikan laporan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada ban permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran.

➤ Pasal 28

1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 di kenai sangsi administratif berupa tangguran lisan atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sangki administratif sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemerintahan sementara dan dapat dilanjutkan dengan perberhentian.

➤ Pasal 29

Kepala desa dilarang;

- a. Merugikan kepentingan umum



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.
- c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, atau kewajiban.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan, korupsi, kolusi dan nepotisme , menerima uang barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabata sebagai ketua anggota badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;
- j. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemelihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/ janji jabatan;

1. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pasal 30

1. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemerintahan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **2.1.6 Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah desa dimaknai sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagai maksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lainnya yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa, di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota desa BPD. Kepala desa yang sarannya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur bertanggung jawabannya disampingnya kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Sesuai dengan peraturan pemerintahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab IV pasal 11 pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintahan republic indonesia undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang definisi desa yaitu kesatuan masyarakatan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sesuai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dengan singkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi dana desa adalah dana yang dilokasikan oleh pemerintahan kabupaten kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota.

Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa, peraturan

desa adalah peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

#### 1. Tugas Pemerintahan Desa

Berdasarkan peraturan pemerintahan republik indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yang terdapat pada bab II mengenai tugas dan kewenangan desa sesuai pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yang diserahkan pengaturannya kepala desa, dimana tugas pembantu dari pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, tugas dan wewenang, kewajiban serta hak kepala desa pasal 14 selaku kepala pemerintahan desa yaitu (1) kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina prekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, pemerintahan desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi;

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina prekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagainya kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, pemerintahan desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi;

Melaksanakan prinsip atau pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menanti dan mengenalkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan bertanggung jawab pengelola keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat desa, membina, mengayomin dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya dan adat istiadat,



memberdayakan masyarakat dan melembagakan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/ walikota memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan perintah desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat 1 (1) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya kepala desa menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada apapun pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya, laporan sebagainya dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh bupati/walikota desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, laporan akhir masa jabatan kepala desa disamping kepada bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD.

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin desa di indonesia, kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Masa jabatan kepala



desa adalah 6 tahun. Wewenang kepala desa adalah menetapkan peraturan desa dengan persetujuan BPD. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkades ( pemilihan kepala desa) kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat ( cahaya berkoordinasi saja ). Kepala desa dapat diberhentikan atas usul BPD kepala bupati/ walikota melalui camat. Syarat-syarat menjadi kepala desa (peraturan pemerintahan No.73 tahun 2005)

1. Bertakwa kepada tuhan YME
2. Setia kepada pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan minimal SLTP
4. Berusia 25 tahun.
5. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
8. Belum pernah menjabat kepala desa dalam 10 tahun
9. Memenuhi syarat lain yang diatur peraturan daerah kabupaten/ kota.

Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, DPRD dan tidak boleh terlibat dalam kampanye pemilihan presiden atau kepala daerah

Wewenang Kepala Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Mengajukan rancangan peraturan desa

3. Menetapkan praturan desa dengan persetujuan BPD.
4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa
5. Membina kehidupan masyarakatan desa
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa.

#### Fungsi Kepala Desa

1. Pelaksanaan adminitratif pemerintahan desa
2. Penanggung jawab jalan pemerintahan, pembagunan, dan pembinaan masyarakat desa.
3. Pembina organisasi kemasyarakatan desa.
4. Menyusun dan penetap peraturan desa
5. Penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, program kerja tahunan dan program kerja 6 tahun.
6. Pengadaan kerja sama antar desa
7. Pelaksanaan kaoordinasi pemerintah desa, pembagunan dan pembina masyarakat.

#### Kepala Desa dapat Diberhentikan Jika:

1. Berakhir masa jabatan.
2. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan
3. Berlahan selam 6 tahun
4. Tidak memenuhi syarat
5. Melanggar sumpah janji
6. Tidak melaksanakan kewajiban desa

7. Melanggar larangan bagi kepala desa

## 2. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa, perangkat desa terdiri sekretaris desa dan perangkat lainnya seperti pelaksanaan lapangan dan unsur kewilayahan sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa. Sekretaris Desa

### 1. Fungsi

1. Pelaksanaan unsur surat menyurat, keuangan dan administrasi
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan
3. Perumus program
4. Pembantu pelayanan kepada masyarakat
5. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan dan laporan
6. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Sekretaris desa dibantu oleh

Kepala urusan yaitu:

### 1. Kepala urusan pemerintahan ( bidang pemerintahan)

Tugas : pembinaan wilayah dan masyarakat administrasi pertanahan. Administrasi kependudukan dan catatan sipil.

### 2. Ketua urusan pembagunan ( bidang pembagunan )

Tugas : merencanakan pembagunan desa pembinaan perekonomian desa pemeliharaan sarana dan prasarana desa

### 3. Kepala urusan keuangan ( bidang keuangan )

Tugas : menyusun laporan keuangan : bendahara desa, pembinaan administrasi keuangan.

#### 4. Kepala urusan kesejahteraan sosial ( bidang kesejahteraan sosial)

Tugas : pelaksana tata usaha, dokumentasi, dan kearsipan, menyiapkan perlengkapan rumah tangga desa, unsur kewilayahan disebut juga kepala dusun.

Tugas : Menyelenggarakan pemerintahan desa di wilayah dusun.pihak yang melayani masyarakat, peraturan desa harus mampu menjalani segala aspek bidang pelayanan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana peran tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mampu memberikan dorongan moril kepada pegawainnya.

## 2.2 Hipotesis

Tipe kepemimpinan demokrasi mampu melaksanakan pemerintahan desa dengan baik khususnya pada Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam menentukan maju-mundurnya aktivitas dalam organisasi. Dalam proses mempengaruhi pegawai dalam mencapai tujuan, tipe kepemimpinan yang diterapkan transaksional dan tipe kepemimpinan demokrasi, tipe kepemimpinan transaksional bercirikan dengan adanya transaksi

antara pemimpin dan anggota. Masing-masing dari kedua bentuk tipe kepemimpinan tersebut memiliki kriteria serta perbedaannya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desai. Selesai berpengaruh terhadap maju mundurnya praktik prokrasi yang dijalankan oleh pegawai. Hal ini juga tergantung pada bagaimana seseorang pemimpin memberikan arahan terhadap pegawai sesuai dengan kemampuan keahlian dibilangnya dengan membentuk batasan- batasan birokrasi tertentu.

Bentuk pelayanan fublik tersebut kerap diselenggarakan oleh instansi pemerintah desa hampir diseluruh wilayah indonesia. Segala bentuk rangkaian aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai merupakan bentuk kewajiban yang telah diatur oleh pemerintahan berdasarkan perundang-undan gan dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penentuan deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud menggambarkan kejadian atau temuan- temuan data dan gejala-gejala yang ada dan yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan (Nawawi, 1991: 63).

Menurut Sutrisno Hadi, Pengelompokan tipe penelitian berdasar kepada sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Penelitian penjajakan (eksploratif)

Merupakan penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa.

b. Penelitian penjelasan (eksplanatori)

Merupakan penelitian yang mayoroti hubungan antara variabel- variabel penelitian dan menguji hipotesa yang dirumuskan sebelumnya.

c. Penelitian deskriptif

Menurut usman dan akbar (2004;4) penelitian deksriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat- sifat populasi tertentu.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Untuk menjawab permasalahan maka diperlukan data yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber data. Sumber data dibagi atas dua sumber yaitu:

a. Data primer

Adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung meliputi responden, yaitu penduduk Desa Dolok Masanggo kecamatan Bintang Bayu.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber- sumber yang mengutip dari data lain tau tidak langsung yaitu meliputi monografi, dokumentasi maupun bentuk- bentuk yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data secara benar dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti.

a. Observasi

Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang di perlukan.

b. Wawancara



Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara ( yang mengajukan pertanyaan ) dan terwawancara ( yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar.

### **3.4 Defenisi Operasional Variabel**

Penelitian ini digunakan beberapa istilah operasional yang digunakan untuk mengukur variabel. Masing – masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurannya. Istilah-istilah yang digunakan adalah:

Tipe kepemimpinan yakni kepemimpinan yang karekeristik, paternalistik, otoriter, militeristik, dan demokrasi.

Pelaksanaan pemerintahan desa yakni tata cara dan prosedur pertan ggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawarakatan desa untuk menyatakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah penelitian menurut Moleong (2006:189-192) meliputi reduksi data penafsiran dengan penyimpulan data dari lapangan dan diaplikasikan dilanjutkan dengan membuat suatu rangkuman data. Rangkuman data tersebut selanjutnya ditafsirkan sesuai dengan metode analisis. Dalam penafsiran data dilakukan secara komprehensif berdasarkan teori-teori yang mendukung akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis model interaktif, Moleong (2006:97) yang terdiri dari tiga (3) kelompok yaitu:

1. Meringankan (reduksi) dari observasi dan wawancara hasil observasi dan wawancara direduksi dalam bentuk rangkuman atau intisari kemudian dilakukan editing terbatas tujuannya agar data yang akan dianalisis merupakan data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (display) dari hasil (observasi) dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dan disajikan dalam bentuk catatan atau penulisan yang mudah dibaca sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.
3. Menyimpulkan (verifikasi) dari hasil (observasi), wawancara dan dokumentasi yang telah diringkas dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coleridge Peter. 1997. *Pembebasan Dan Pembangunan* (Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang). Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Dessler. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo.
- Martoyo, Susilo, 2001. Pendidikan dan Kepemimpinan. Rineka Cipta. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nawawi, Hadari. 1999. Pemimpin dan Kepemimpinan Efektif. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ranupandojo H, Suad Husman. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang *Organisasi Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)
- Robbin, P.S. 2003. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Edisi Kelima. Penerbit : Erlangga. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta LP3ES
- Suharwo Hendro. 2006. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa* Skripsi STPMD/APMD
- Surakhimad, Winarmo. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Alumni.
- Surjadi, A. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Alumni. Bandung
- Susilo, Martoyo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.